

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPUTUSAN**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN**

**SUMBER DAYA MANUSIA**

**NOMOR 31 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI**

**PELAKSANA UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 angka 3 huruf b Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa, perlu menetapkan Pelaksana Uji Kompetensi;
- b. bahwa Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kepulauan Bangka Belitung telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia tentang Penetapan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kepulauan

Bangka Belitung Sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
  4. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG SEBAGAI PELAKSANA UJI KOMPETENSI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Tipe A yang memiliki TUK Mandiri di

Pangkalpinang dengan kapasitas 113 Peserta serta TUK Sewaktu di Wilayah I, dengan Sumber Pembiayaan berasal dari APBD.

- KEDUA : Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kepulauan Bangka Belitung sebagai Pelaksana Uji Kompetensi Tipe A yang memiliki TUK Mandiri di Pangkalpinang dengan kapasitas 113 Peserta serta TUK Sewaktu di Wilayah I ditetapkan sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan sampai dengan berakhirnya masa berlaku Akreditasi Lembaga Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa (LPPBJ).
- KETIGA : Apabila dalam masa berlaku sebagaimana pada diktum KEDUA, terdapat perubahan pada instansi yang mengakibatkan persyaratan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi menjadi tidak terpenuhi, maka penetapan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi berakhir.
- KEEMPAT : Pelaksana Uji Kompetensi sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas, fungsi, dan wewenang, serta wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan lainnya.
- KELIMA : Status Penetapan sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat diperpanjang apabila persyaratan untuk menjadi Pelaksana Uji Kompetensi masih terpenuhi melalui usulan Pimpinan Pelaksana Uji Kompetensi.

**KEENAM** : Status sebagai Pelaksana Uji Kompetensi dapat dicabut apabila Pelaksana Uji Kompetensi melakukan pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam Keputusan Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Mutu Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan lainnya.

**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2023

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN  
DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA  
MANUSIA,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik

SUTAN SUANGKUPON LUBIS

Tembusan:

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id> atau kunjungi halaman <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

**Token** : GIBX2L

**Nomor Tiket** : OA202307270001